

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki tujuan negara yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan Negara Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 tepatnya pada alenia keempat. Kesejahteraan manusia dapat diukur melalui pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi wilayah yang semakin meningkat maka kesejahteraan juga meningkat, begitupun sebaliknya. Lanjouw berpendapat bahwa kemiskinan di Indonesia berkurang dikarenakan pembangunan manusia yang terus meningkat (Lanjouw et al., 2001).

United Nations Development Programme (UNDP) pertama kali memperkenalkan konsep pembangunan manusia pada tahun 1990 pada *Human Development Report (HDR)*. UNDP menempatkan gagasan pembangunan manusia tidak hanya sebagai input dari pembangunan namun juga merupakan tujuan akhir pembangunan, maksudnya masyarakat diharapkan dapat melangsungkan hidup sehat, mempunyai umur yang panjang, mendapat standar hidup layak, dan menguasai pengetahuan (Karyono et al., 2021).

UNDP dalam *Human Development Report* menyebutkan manusia merupakan kekayaan suatu bangsa. Menciptakan lingkungan yang nyaman untuk rakyat menikmati umur panjang, hidup sehat dan menjalani hidup dengan produktif adalah tujuan utama pembangunan (Ramadhan, 2018).

United Nation Development Program (1995) menetapkan paradigma pembangunan manusia terdapat empat komponen yaitu yang pertama

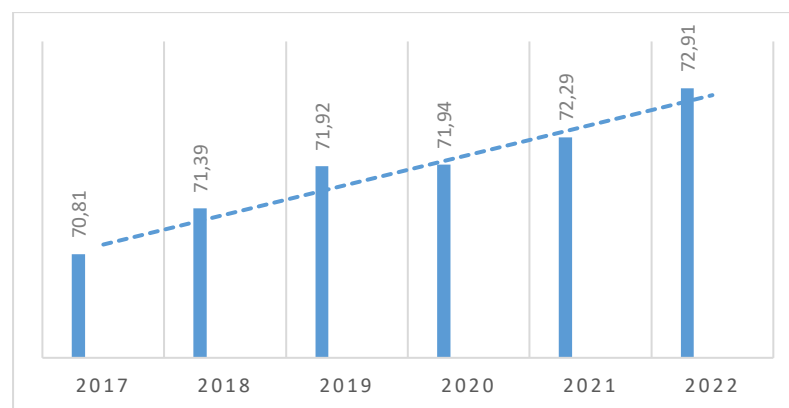
produktivitas. Manusia harus mampu secara penuh berpartisipasi dalam memperoleh pekerjaan dan penghasilan untuk meningkatkan produktivitas. Pertumbuhan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan manusia dikarenakan partisipasi manusia dalam memperoleh pekerjaan untuk meningkatkan penghasilan. Komponen yang kedua yaitu ekuitas. Hambatan peluang politik dan ekonomi harus dihapus dengan tujuan seluruh masyarakat dapat memperoleh manfaat dan berpartisipasi secara adil. Kesenambungan merupakan komponen pembangunan manusia yang ketiga. Masyarakat atau manusia harus memperoleh kesempatan bukan hanya generasi saat ini namun juga generasi di masa depan. Komponen yang keempat yaitu pemberdayaan yang harus diikuti oleh masyarakat baik formal maupun informal.

Pembangunan manusia butuh perhatian yang lebih dikarenakan kebanyakan negara berkembang (Indonesia) tidak dapat mengurangi kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan sosial ekonomi padahal mampu mencapai pertumbuhan ekonomi. Negara yang memiliki pendapatan tinggi (negara maju) juga tidak dapat mengurangi masalah sosial, misalnya kekerasan rumah tangga, AIDS, minuman keras, penggunaan obat terlarang, dan masih banyak lagi. Negara yang dengan bijaksana menggunakan semua sumber daya manusia dan mencapai pembangunan manusia tinggi justru negara dengan pendapatan rendah (Ramadhan, 2018).

UNDP menentukan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang digunakan mengukur kesejahteraan dan pembangunan manusia. Indikator IPM prdilihat dari tiga dimensi yaitu: angka harapan hidup saat lahir (*life expectancy at birth*) berfungsi mengukur tingkat kesehatan, angka melek huruf (*literacy rate*) dan rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) digunakan untuk mengukur

tingkat pendidikan, dan kemampuan daya beli (*purchasing power parity*) berfungsi untuk mengukur standar hidup layak (Nugroho & Rahmawati, 2019).

Indonesia merupakan negara dengan tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus meningkat dari tahun 2017 hingga 2022. IPM yang mengalami peningkatan menandakan bahwa kualitas sumber daya manusia di Indonesia meningkat. Berikut data IPM di Indonesia tahun 2017-2022.



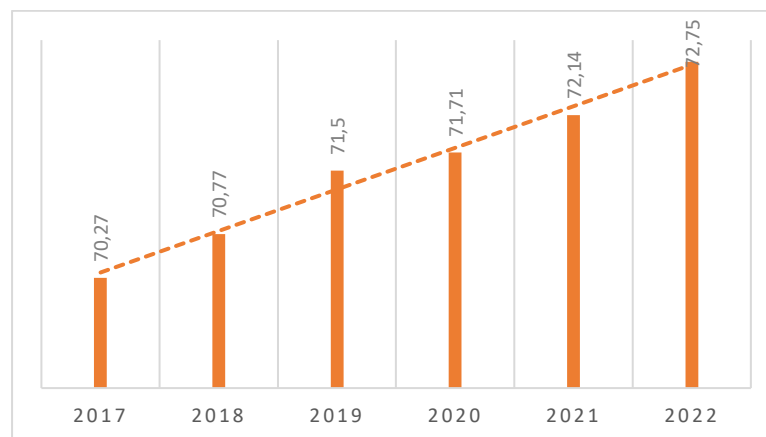
Gambar 1.1 Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Tahun 2017-2022

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Data tersebut menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Negara Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2017 yaitu 70,81 hingga tahun 2022 mencapai 72,9. Pulau Jawa merupakan pulau dengan beragam kebudayaan Indonesia. Pulau Jawa memiliki enam provinsi diantaranya adalah Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Pusat pemerintahan yang terletak di Pulau Jawa memberikan banyak dampak positif diantaranya Pulau Jawa sebagai pusat kegiatan perekonomian, dan pusat kegiatan perindustrian. Keunggulan pulau Jawa yang banyak memiliki potensi, tentu kualitas SDM menjadi masalah yang serius. Kualitas manusia yang baik sangat dibutuhkan untuk mengelola pemerintahan dan

perekonomian. Kualitas SDM yang baik ditentukan dengan tingkat kesehatan, pendidikan, dan ekonomi melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Peningkatan IPM di Indonesia tidak lepas dari partisipasi masyarakat dalam menjalankan program pemerintah seperti mematuhi program wajib belajar 12 tahun, mengoptimalkan anggaran untuk kesehatan dan pendidikan, mengadakan pelatihan kerja, memperluas lapangan pekerjaan dengan tujuan meningkatkan pendapatan perkapita sehingga diperoleh standar hidup layak. Jawa Timur juga turut andil dalam pelaksanaan program pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas manusia. Program tersebut terbukti berhasil dalam meningkatkan kualitas manusia di Jawa Timur dengan meningkatnya IPM Jawa Timur dari tahun 2017 hingga 2022 menurut Badan Pusat Statistik (BPS).

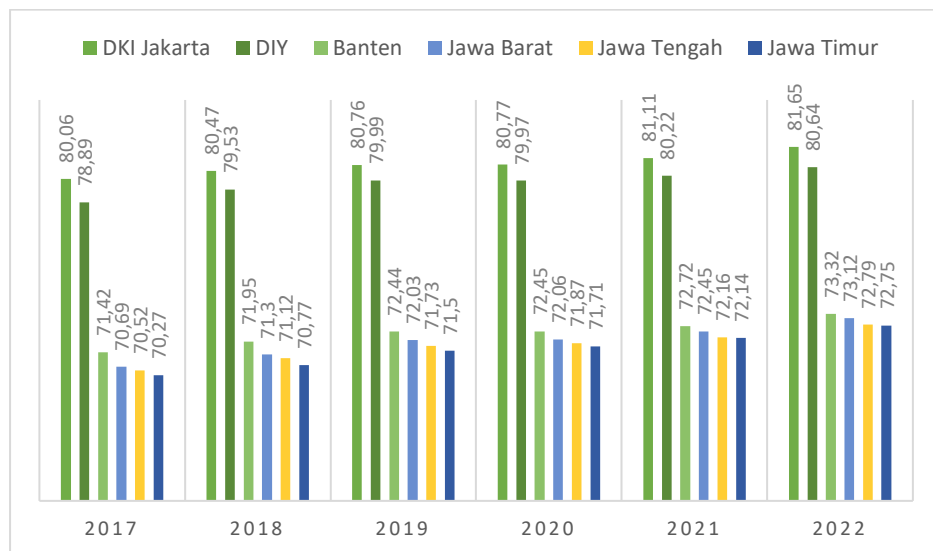


Gambar 1.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur tahun 2017-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

IPM Provinsi Jawa Timur dari tahun 2017 hingga 2022 mengalami peningkatan. Tahun 2017 IPM Provinsi Jawa Timur menunjukkan angka 70,27 dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 mencapai 70,71. IPM Provinsi Jawa Timur tahun 2019 mencapai 71,50 dan terus meningkat pada 2020 yaitu 71,71. Tahun 2021 yaitu 72,14 dan pada tahun 2022 sebesar 72,75. Indeks

pembangunan manusia Provinsi Jawa Timur terus mengalami peningkatan, tetapi tergolong provinsi dengan pencapaian IPM paling rendah dibandingkan dengan lima provinsi lain di Pulau Jawa. Provinsi Jawa Timur masih menjadi yang terendah dibandingkan dengan Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

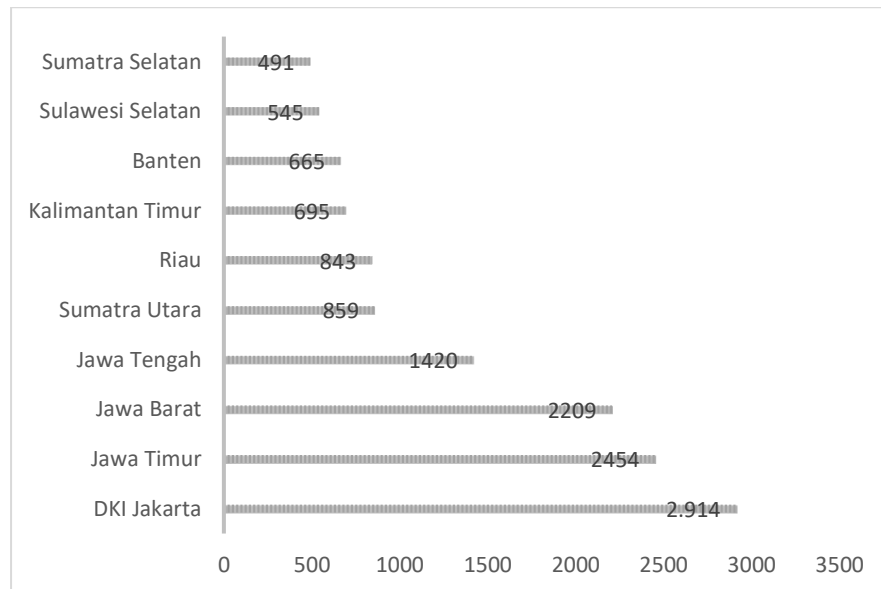


Gambar 1.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 6 Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2017-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Data di atas menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki IPM yang paling rendah dari enam provinsi lain di Pulau Jawa. Provinsi Jawa Timur meskipun menjadi penyumbang IPM yang paling rendah di Pulau Jawa, tetapi mempunyai pencapaian dalam bidang ekonomi. Pencapaian yang dimaksud yaitu Provinsi Jawa Timur adalah provinsi penyumbang PDRB tertinggi nomor dua di Indonesia setelah Provinsi DKI Jakarta. DKI Jakarta menjadi penyumbang PDRB nomor satu di Indonesia sebesar 2.914 triliun kemudian Jawa Timur 2.454 triliun. Jawa Barat menjadi urutan nomor tiga dengan PDRB 2.209 triliun dan Jawa

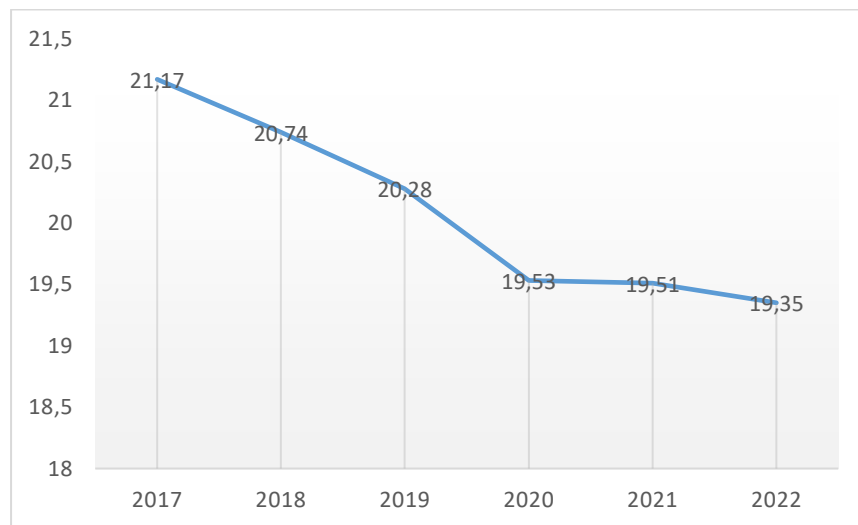
Tengah dengan PDRB 1.420 triliun. Berikut data sepuluh provinsi penyumbang PDRB tertinggi di Indonesia.



Gambar 1.4 Sepuluh Provinsi Penyumbang PDRB Tertinggi di Indonesia Tahun 2022 (Triliun Rupiah)

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Pencapaian PDRB Jawa Timur tentu menjadi prestasi yang baik, namun masih terdapat masalah kualitas manusia Jawa Timur. Pembangunan manusia di Jawa Timur masih terjadi ketimpangan. Ketimpangan pemerataan pembangunan manusia tersebut dapat dilihat dari selisih pencapaian indeks pembangunan manusia kabupaten/kota tertinggi dengan terendah. Kota Surabaya enam tahun terakhir memiliki pembangunan manusia yang paling tinggi di Jawa Timur. Kabupaten Sampang menjadi kabupaten yang memiliki pembangunan manusia paling rendah di Jawa Timur. Ketimpangan pembangunan manusia di Jawa Timur perlu perhatian yang khusus karena ketimpangan tersebut berada pada angka yang cukup tinggi dengan selisih rata-rata IPM sebesar 20,09 persen.



Gambar 1.5 Selisih IPM Tertinggi dengan Terendah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2022

Mankiw (2008) mengemukakan perbaikan kualitas modal manusia merupakan salah satu cara mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM). Kualitas manusia diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia melalui pendidikan dan kesehatan. Tingkat pendidikan mencerminkan kualitas tenaga kerja karena keterampilan sumber daya manusia akan bertambah. Kesehatan yang baik menjadikan SDM lebih kuat dan baik pemikirannya dalam bekerja. (Asrida & Haryani, 2022).

Pendidikan merupakan kunci kemampuan perekonomian dalam mempengaruhi teknologi di era modern dan membangun kapasitasnya dalam pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan. Todaro pada tahun 2004 berpendapat bahwa pada negara berkembang yang menjadi prioritas utama dalam mengembangkan kualitas manusia sejak dini adalah pendidikan dasar (Rosyadah, 2021). Tingkat pendidikan yang semakin tinggi mencerminkan semakin tinggi peluang kesejahteraan yang akan didapat.

Langkah untuk meningkatkan kualitas pendidikan menurut BPS adalah dengan menyekolahkan anak pada tingkat pendidikan dan usia yang sesuai. Angka partisipasi murni dapat menunjukkan jumlah penduduk yang bersekolah

sesuai usia dan tingkat pendidikan. Angka partisipasi murni tingkat SMA/SMK/Sederajat Provinsi Jawa Timur terus mengalami peningkatan semenjak tahun 2017-2022. SMA/SMK/Sederajat disebut proporsi anak bersekolah usia 16-18 tahun. APM Jawa Timur tahun 2017 sebesar 60,67 sedangkan pada 2022 naik mencapai 63,10.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase yang digunakan untuk melihat ketepatan anak usia sekolah masuk dalam lembaga pendidikan (Effendy et al., 2023). Rosyadah (2021) mengatakan meningkatnya angka partisipasi murni akan meningkatkan indeks pembangunan manusia (Rosyadah, 2021). Hasil penelitian Asrida dan Haryani juga mengatakan bahwa APM yang mewakili indikator pendidikan yang mengalami peningkatan, maka akan meningkatkan indeks pembangunan manusia (Asrida & Haryani, 2022).

Tingkat pendidikan yang semakin tinggi mencerminkan pengetahuan yang dimiliki juga semakin luas. Pengetahuan yang dimiliki menyebabkan seseorang mendapat pekerjaan yang baik dan tingkat pendapatan yang juga baik. Orang berpendidikan cenderung lebih produktif dibandingkan dengan orang yang tidak berpendidikan, karena itu semakin tinggi tingkat pendidikan semakin tinggi indeks pembangunan manusia (Asrida & Haryani, 2022).

Faktor penentu pembangunan manusia selain pendidikan adalah kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu masalah yang eksplosif dalam negara berkembang. Kesehatan lingkungan merupakan salah satu aspek penting untuk menentukan kehidupan sosial, karena itu kesehatan yang baik mempengaruhi sumber daya manusia. SDM yang sehat karena tempat hidup yang sehat menghasilkan output yang baik dan meningkatkan kualitas hidup dan efisiensi kerja (Mursyidah et al., 2022). Memperluas pilihan yang dimiliki adalah salah satu

tujuan pembangunan manusia. Pilihan tersebut dapat berupa menikmati hidup sehat dan umur panjang, mempunyai pengetahuan dan keterampilan, dan memiliki kehidupan yang produktif (Khoirunnisa, 2022). Pilihan-pilihan tersebut menciptakan dorongan tercapainya sumber daya manusia yang berkualitas.

Meningkatnya indeks pembangunan manusia dapat direfleksikan dengan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan standar hidup layak. Peningkatan kualitas kesehatan dapat dilakukan dengan menurunkan angka kematian khususnya Angka Kematian Bayi (AKB). Kesehatan masyarakat yang meningkat bercermin pada angka kematian bayi yang menurun dan peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir (Novitasari & Wenagama, 2020). Tren penurunan AKB bersamaan dengan peningkatan AHH yang merupakan indikator komposit dari IPM. Wenagama juga menyatakan bahwa AKB memiliki pengaruh negatif terhadap angka harapan hidup, saat angka kematian bayi menurun maka angka harapan hidup akan meningkat dan berdampak pada peningkatan indeks pembangunan manusia.

Angka kematian bayi Provinsi Jawa Timur terus mengalami penurunan dari tahun 2017-2022. Penurunan AKB tersebut mencerminkan pelayanan kesehatan Jawa Timur yang baik. AKB yang mengalami penurunan juga mencerminkan meningkatnya angka persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan dan meningkatnya kesehatan ibu (Zuhairroh, 2018). Nur Azizah dalam penelitiannya menyatakan bahwa AKB yang menurun dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia (Azizah & Pramodyo, 2019). AKB merupakan salah satu komponen pengukur derajat kesehatan suatu daerah. AKB mencerminkan baik atau buruknya kinerja pelayanan dan fasilitas kesehatan khususnya fasilitas kesehatan dasar seperti puskesmas dan posyandu.

Pelaksana pembangunan seperti pemerintah membutuhkan modal manusia yang berkualitas. Modal manusia yang berkualitas tentu membutuhkan peran infrastruktur yang memadai dalam pendidikan, kesehatan, sarana distribusi, dan lainnya. Infrastruktur kesehatan dasar seperti puskesmas dan posyandu sangat dibutuhkan untuk melayani kesehatan masyarakat. Infrastruktur memiliki peranan masing-masing untuk membangun kualitas manusia (Sinaga, 2020).

Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang layak. Adanya puskesmas dan posyandu sebagai fasilitas kesehatan dasar dapat menentukan pelayanan masyarakat dalam bidang kesehatan. Tingkat kesehatan yang tinggi akan meningkatkan kesejahteraan penduduk, hal tersebut berkaitan dengan tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai (Aningtyas et al., 2015). Pembangunan fasilitas kesehatan merupakan salah satu cara yang dapat memberikan dampak terhadap kualitas sumber daya manusia, karena itu infrastruktur yang layak menjadi perhatian yang harus dikelola dengan baik (Alaika Nurfauziah, 2021).

Annaafi mengatakan bahwa fasilitas kesehatan terdapat hubungan positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kenaikan pada fasilitas kesehatan akan meningkatkan indeks pembangunan manusia (Annaafi, 2020). Keterbatasan fasilitas kesehatan menyebabkan kualitas kesehatan masyarakat menjadi rendah, hal lain penyebab rendahnya kualitas kesehatan masyarakat adalah karena kondisi lingkungan, pemukiman dan cara hidup masyarakat yang kurang sehat (Alaika Nurfauziah, 2021). Aningtyas menyebutkan bahwa semakin banyak fasilitas kesehatan maka akan tercipta sumber daya manusia yang sehat dan meningkatnya kualitas kesehatan sumber daya manusia sehingga masyarakat dapat menikmati umur panjang dan hidup sehat. (Aningtyas et al., 2015).

Standar hidup layak merupakan dimensi ketiga untuk mencapai pembangunan kualitas manusia. Tingkat perekonomian yang semakin baik mencerminkan tingkat kesejahteraan penduduk yang juga semakin baik (Rustariyuni, 2014). Pengukuran standar hidup layak menurut UNDP menggunakan GDP riil yang disesuaikan, sedangkan menurut BPS pengukuran standar hidup layak dilakukan dengan rata-rata pengeluaran perkapita riil disesuaikan. Kesejahteraan masyarakat dapat terwujud dengan meningkatnya pengeluaran perkapita daerah.

Pengeluaran perkapita dapat digunakan sebagai acuan dalam memperoleh standar hidup layak karena mencerminkan daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan (Asmawani & Pangidoan, 2021). Daya beli merupakan kemampuan masyarakat membelanjakan pendapatannya untuk barang atau jasa yang dibutuhkan. Kemampuan daya beli masyarakat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat sehingga dapat memperoleh standar hidup layak. Penelitian Arofah mengatakan pengeluaran perkapita riil disesuaikan yang mengalami peningkatan dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia (Arofah & Rohimah, 2019).

Provinsi Jawa Timur memiliki tren pengeluaran perkapita yang fluktuatif. Tren tersebut dikarenakan dampak *covid-19* pada Desember 2019. Wabah *Covid-19* mengakibatkan menurunnya pengeluaran perkapita Jawa Timur tahun 2020 dikarenakan masyarakat dilarang untuk keluar rumah sehingga konsumsi masyarakat menurun. Tahun 2021 pengeluaran perkapita Jawa Timur kembali naik hingga tahun 2022.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini membahas tentang Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Kematian Bayi (AKB), fasilitas kesehatan, dan pengeluaran perkapita riil disesuaikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2022. Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh secara parsial atau individu antara variabel terikat yaitu Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Kematian Bayi (AKB), fasilitas kesehatan, dan pengeluaran perkapita riil disesuaikan terhadap variabel bebas Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2022 ?
2. Bagaimana pengaruh secara simultan atau bersama-sama variabel terikat Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Kematian Bayi (AKB), fasilitas kesehatan, dan pengeluaran perkapita riil disesuaikan terhadap variabel bebas Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2022 ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa pengaruh Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Kematian Bayi (AKB), fasilitas kesehatan, dan pengeluaran perkapita riil disesuaikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia secara parsial di Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2022.
2. Untuk menganalisa pengaruh Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Kematian Bayi (AKB), fasilitas kesehatan, dan pengeluaran perkapita riil disesuaikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia secara simultan di Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2022.

1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah perlu dilakukan oleh peneliti dengan tujuan penelitian berjalan lebih efektif, efisien, terarah, dan bisa dikaji lebih dalam. Kualitas manusia menjadi masalah yang penting dalam pembangunan nasional maupun daerah. Kualitas manusia dapat diukur menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM secara nasional terus mengalami peningkatan selama enam tahun terakhir, begitu juga dengan IPM di Provinsi Jawa Timur. IPM Jawa Timur meski yang terendah di Pulau Jawa namun menjadi provinsi penyumbang PDRB tertinggi nomor dua di Indonesia, namun masih terjadi ketimpangan dalam pemerataan pembangunan manusia. IPM yang semakin tinggi berarti pembangunan manusia di suatu daerah semakin baik. Meningkatnya tingkat pendidikan, kesehatan, dan ekonomi juga turut mempengaruhi pembangunan manusia.

1.5 Manfaat Penelitian

1.1.1 Pemerintah selaku pengambil kebijakan:

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat terkait masalah Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Kematian Bayi (AKB), jumlah fasilitas kesehatan, pengeluaran riil perkapita serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam mengambil dan menentukan kebijakan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

1.1.2 Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sebagai pelaku atau tokoh utama dalam mencapai kesejahteraan. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan karena tanpa adanya timbal balik dari masyarakat yang

antusias dalam melaksanakan kebijakan pemerintah maka tujuan negara tidak akan terpenuhi.

1.1.3 Bagi Akademisi / Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi literasi bagi pihak akademisi / mahasiswa sebagai literatur atau referensi dalam penelitian selanjutnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber ilmu bidang ekonomi pembangunan khususnya mengenai kualitas modal manusia.

1.1.4 Bagi Peneliti / Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan untuk penulis mengenai Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Kematian Bayi (AKB), fasilitas kesehatan, pengeluaran perkapita riil disesuaikan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selain itu juga menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya agar menjadi lebih baik lagi.